

# Anies Mau Hapus LPJ Dana RT/RW,

Ada yang Senang, Ada yang Anggap Lucu

**SETYO ADI NUGROHO**

Kompas.com - 06/12/2017, 13:59 WIB



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017). (KOMPAS.com/NURSITA SARI)

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghapus laporan pertanggungjawaban [dana operasional](#) RT/RW di Jakarta tahun depan ditanggapi beragam oleh pengurus.

Kebijakan ini diambil karena Anies ingin pengurus RT/RW fokus mengurus warga dibanding hanya mengurus administrasi seperti [LPJ](#).

Tritanto, pengurus RW 13 Gedong Panjang, Penjarangan setuju dengan langkah ini. Ia merasa pemerintah pusat cukup mempercayakan [dana operasional](#) pada pengurus RT/RW.

"Itu lebih bagus karena dari pada buat laporan *mengada-ngada* tidak baik juga. Lebih baik dipercayakan dana tersebut buat pengurus RW mengatur wilayahnya," ucap Tritanto saat dihubungi Rabu (6/12/2017).

Baca juga : [Sumarsono soal LPJ Dana RT/RW: Setiap Rupiah APBD Wajib Dipertanggungjawabkan!](#)

Lain lagi, menurut Januar, Sekretaris RT 002 Sunter Jaya. Dia menganggap kebijakan penghapusan LPJ operasional RT/RW membuat bingung. Sebab, bila uang operasional

untuk kebutuhan warga di lingkungan tidak menggunakan pertanggung jawaban, bisa dipikir untuk pribadi.

"Dana itu kan diturunkan buat operasional (per tiga bulan). Kalau tidak ada pertanggungjawaban, itu kan diambil dari APBD, jadi lucu seperti bagi-bagi uang saja," ucap Januar.

Baca juga : [Anies: 2018, Bapak Ibu RT/RW Tak Perlu Tulis LPJ Dana Operasional...](#)

Januar mencontohkan kasus beberapa waktu lalu mengenai penarikan iuran lingkungan yang viral. Jika uang swadaya kebersihan tersebut tidak dilaporkan, maka penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan itu dapat membuat kondisi tidak nyaman.

"Makanya kemarin ada pengumuman iuran swadaya untuk kebersihan berapa, total berapa, jumlah dana yang dibutuhkan berapa. Ternyata butuh Rp 12 juta, terkumpul dari warga Rp 8 juta, sisanya itu pakai dana operasional. Dilaporkan tertulis, jelas, ke kelurahan," ucap Januar.

Baca juga : [LPJ Dana Operasional RT/RW Mau Dihapus, Rencananya Diganti Pakai Tanda Terima](#)

Sia Liong Hok, Ketua RW 05 Pluit, mengungkapkan peraturan ini dapat dilihat plus minus karena di masing-masing wilayah memiliki kebutuhan berbeda. Di wilayahnya yang merupakan kompleks perumahan yang memiliki kebutuhan tetap setiap bulannya, pelaporan dilakukan setiap bulan.

"Tergantung wilayah bisa dilihat plus minus. Kalau diperumahan seperti tempat saya, dana operasional pemda tidak akan cukup. Makanya kami ada swadaya untuk uang keamanan, fogging, kebersihan dan lainnya yang tiap bulannya pasti dilaporkan. Kalau nanti tidak perlu laporan ya sudah, ikut saja," ucap pria yang disapa Ahok ini.

Pada 2018, setiap RT akan menerima dana operasional Rp 2 juta setiap bulan dan RW akan menerima dana operasional Rp 2,5 juta.

Baca juga : [Ini Alasan Gubernur Anies Hapus LPJ Dana Operasional RT/RW](#)

Sistem pertanggungjawaban dana operasional oleh ketua RT dan RW kembali manual sejak pergub yang mewajibkan laporan via aplikasi Qlue dihapus.

LPJ biasanya dibuat tiga bulan sekali. [Dana operasional](#) untuk RT dan RW juga diberikan per tiga bulan.

LPJ itu berisi laporan penggunaan dana operasional RT dan RW tiap bulannya. LPJ itu juga menjadi syarat agar dana operasional triwulan berikutnya bisa dicairkan.